



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM “RIAU BERGERAK TANAM PADI
(BERTANI)” OLEH DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU DI KECAMATAN RIMBA
MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana S1
Program Studi Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NIKMATUL KHOIRIYAH

NIM : 12070522227

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

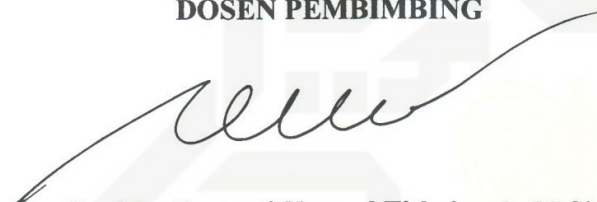
1445 H/2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nikmatul Khoiriyah
 Nim : 12070522227
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (BERTANI) Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
 NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara




Dr. Mahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nikmatul Khoiriyah
 Nim : 12070522227
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (BERTANI) Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
 Tanggal Ujian : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Dra. Kafrina, M.Si
 NIP. 196308101988032001

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatul Khoiriyah
 NIM : 1207052227
 Tempat/Tgl. Lahir : Kencana, 05 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (BERTANI)
Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi
Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Januari 2020
 Yang membuat pernyataan



NIM : 1207052227

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM “RIAU BERGERAK TANAM PADI (BERTANI)” OLEH DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU DI KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh : Nikmatul Khoiriyah

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Abstrak :

Tujuan dari Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) adalah upaya pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan produksi padi di Riau minimal 50% pada tahun 2024. Strategi "Riau Bertani" berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk optimalisasi lahan dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Program ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks pertanaman melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan penerapan mekanisasi pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Program Riau (Bertani) Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rohil. Hasil penelitian menunjukkan Program Riau Bertani Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinisi Riau pada Kabupaten Rokan Hilir sudah mampu terlaksana dan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator organisasi memainkan peran krusial dalam mencapai kedaulatan pangan melalui pembagian tugas dan manajemen yang efektif, di mana sumber daya manusia, finansial, dan alam menjadi faktor penentu dalam implementasi program seperti "Riau Bergerak Tanam Padi." program Riau Bertani juga mengintegrasikan penggunaan bibit unggul, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), penerapan mekanisasi, dan penguatan kelembagaan untuk mengatasi tantangan dalam pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan ketahanan pangan, serta mengurangi risiko gagal panen. Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian, kesejahteraan petani, dan memastikan keberlanjutan pertanian di daerah tersebut.

Kata kunci: Dampak, Program, Tanaman, Padi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM "RIAU MOVES PLANTING RICE (FARMERING)" BY THE RIAU PROVINCE FOOD CROPS AND HORTICULTURE OFFICE IN RIMBA MELINTANG DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT

By: Nikmatul Khoiriyah

State Administration Study Program, Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University, Pekanbaru, Indonesia

Abstract :

The aim of the Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Program is an effort by the Riau Provincial Government to increase rice production in Riau by at least 50% by 2024. The "Riau Bertani" strategy focuses on improving agricultural infrastructure, including optimizing land use and providing agricultural tools and machinery (alsintan). This program is a concrete effort by the local government to increase the planting index through improved land utilization and the implementation of agricultural mechanization. The purpose of this research is to assess the impact of the Riau Bertani Program by the Department of Food Crops and Horticulture of Riau Province in Rimba Melintang District, Rokan Hilir Regency. The research findings show that the Riau Bertani Program by the Department of Food Crops and Horticulture of Riau Province in Rokan Hilir has been successfully implemented and is running quite well. This can be seen from the indicator that the organization plays a crucial role in achieving food sovereignty through effective task division and management, where human, financial, and natural resources are key factors in the implementation of programs such as Riau Bergerak Tanam Padi. The Riau Bertani program also integrates the use of superior seeds, an increase in the Planting Index (IP), the application of mechanization, and strengthening of institutional capacity to address agricultural challenges. The program aims to improve productivity, efficiency, and food security, as well as reduce the risk of crop failure. Through these strategies, it is expected to improve agricultural yields, the welfare of farmers, and ensure the sustainability of agriculture in the region.

Keywords: Impact, Program, Crops



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli AlaSyaidinaa Muhammad Waala Ali Syaidinaa Muhammad mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amiin ya Rabbal Alamiin.

Skripsi ini berjudul Implementasi Program “Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)” Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat kesalahan-kesalahan dalam hal penulisan dan sebagainya, oleh karena itu kritik dan saran dari saudara/I pembaca sangat penulis perlukan dalam rangka mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa didalam hidup penulis. sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan do’a dan restunya yaitu teristimewa kepada orang tua Ibunda Kusmiati yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap semangat dan tegar seperti beliau dan Ayahanda Kusno yang mana seorang ayah yang mampu menjadikan penulis berada di tahap skripsi sekarang, karena tanpa beliau penulis tidak akan pernah berada di posisi sekarang ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Dan tidak lupa Untuk adik penulis Laila Lathifa dan M. Syauqi Zulchair yang telah bekerjasama penulis untuk menjaga ibunda dan ayahanda dikampung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan untuk seluruh keluarga besar penulis ucapkan Jazakumullah Khairan atas cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang mana tempat penulis melakukan Parktek Kerja Lapangan sekaligus tempat penelitian penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasehat serta motivasi sehingga penulisan proposal ini dapat diselesaikan. Terimakasih kepada Ibu yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan.
7. Sahabat administrator muda tersayang, Nadatul Mafella, S.Sos, Rimayanti, S.Sos, Resti Astuti, S.Sos, Karlina Oktavia Harahap, S.Sos, yang telah berperan banyak dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah, yang telah menemani dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini. Dan semua teman-teman Administrasi Negara Lokal E angkatan 2020.
8. Sahabat terbaik semasa kuliahku Yuyun Suhaira terimakasih telah menjadi sahabat baik penulis selama masa perkuliahan ini, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk peneliti dan terimakasih juga kepada Putri Kurnia untuk dukungan serta segala bantuan selama peneliti menyelesaikan perskripsian ini. Serta teman-teman KKN Desa Bangko Mukti UIN Suska Riau Tahun 2023.
9. Sahabat seperjuangan Amayani S.H dan Saskira Noviana Tambunan S.Farm Serta sahabat dikampung Ayu Budiatty Ikbal Mahendra Ardellia Suryani yang ikut serta memberikan semangat kepada penulis dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih untuk diri sendiri Nikmatul Khoiriyah, atas kerja keras dan semangatnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulis tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya. Terakhir penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini membawa manfaat bagi Saudara/I pembaca dan do`a serta semangat dari Allah SWT. AamiinYa Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis,

NIKMATUL KHOIRIYAH
NIM. 12070522227



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Batasan Masalah	13
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kebijakan Publik	15
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik	18
2.4 Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani).....	26
2.5 Dasar Hukum Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)	27
2.6 Pandangan Islam Tentang Pertanian.....	29
2.7 Penelitian Terdahulu	32
2.8 Definisi Konsep.....	36
2.9 Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani).....	39
2.10 Konsep Operasional.....	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Berfikir	41
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Jenis Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Analisis Data.....	45
BAB IV	48
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Gambaran Umum Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	48
4.2 Visi dan Misi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	49
4.3 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	50
4.4 Bagian/Unit Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	58
4.5 Struktur Organisasi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	59
4.6 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	60
4.7 Program Riau Bertani	63
BAB V.....	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.....	64
BAB VI.....	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan Jumlah Target Produksi Padi Tahun 2021-2024	5
Tabel 1.2 Produksi Padi di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (Ton)	
2022- 2023.....	6
Tabel 1.3 Produksi Beras di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (Ton)	
2022- 2023.....	7
Tabel 1.4 Data Realisasi Padi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian	43
Tabel 4.1 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.....	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman padi merupakan tanaman penghasil beras dan juga sebagai penghasil makanan pokok penduduk Indonesia. Beras yang merupakan sumber makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga kebutuhan beras akan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk (Nurjanah 2020). Di Indonesia, sebagian besar penduduk membutuhkan beras sebagai kebutuhan pokok, dan permintaannya terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, komoditas ini dianggap strategis baik untuk saat ini maupun masa depan karena peran beras sebagai makanan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena beras membutuhkan banyak tenaga kerja dan pasokan air, budidaya beras cocok di daerah dengan iklim hangat, biaya tenaga kerja murah, dan curah hujan tinggi. Sebagian besar wilayah yang memenuhi kriteria tersebut berada di Asia. Karakteristik petani Asia adalah mayoritas berasal dari daerah miskin dan hidup dalam lingkungan yang kurang berkembang.

Menurut hasil Survei kerangka sampel area (KSA), luas panen padi tahun 2022 mencapai 10,45 juta hektar, naik 40,87 ribu hektar (0,39 persen) dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, produksi padi tahun 2022 sebesar 54,75 juta ton GKG, jika dikonversikan menjadi beras, mencapai 31,54 juta ton, atau naik 18,45 juta ton (0,59 persen) dibandingkan dengan tahun (BPS Indonesia 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau pada tahun 2022, Provinsi Riau memiliki populasi sekitar 6.743.099 orang, meningkat sebesar 2,56% dibandingkan dengan populasi tahun sebelumnya, 6.574.932 orang. Tersebar di dua belas kabupaten/kota. Dengan populasi 6.743.099 jiwa dan kebutuhan beras sebesar 496.832,53 ton per tahun (atau 73,68 kg per orang per tahun) dan rasio produksi dan kebutuhan beras 0,29, produksi tanaman padi tahun 2022 sebesar 213.577 ton dan dikonversi ke beras menjadi 136.057,16 ton, provinsi Riau masih kekurangan beras sebesar 351.989,19 ton, atau 70,85 persen dari kebutuhan beras (pmddukcapil.riau.go.id , Desember 2022)

Produksi padi di Riau masih kurang memuaskan, dengan rata-rata 4 ton per hektar, sementara di daerah lain sudah mencapai lebih dari 5 dan 6 ton per hektar. Jenis tanah podzolik merah kuning, yang tingkat kesuburannya rendah, keasamannya tinggi, dan kurangnya aerasi, adalah penyebab utama penurunan produktivitas ini di Riau. Tidak diragukan lagi, tidak semua persawahan di Riau memiliki kondisi yang baik. Namun, beberapa lokasi produksi seperti Bungaraya di Kabupaten Siak, Kuala Kampar di Pelalawan, Reteh dan Kempas Jaya di Kabupaten Indragiri hilir, dan lain-lain, memiliki produktivitas yang cukup tinggi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019–2024, Gubernur Riau telah menetapkan visi dan misi, kebijakan, dan program strategis. Salah satu program strategis yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan produksi pangan, khususnya padi, dengan tujuan untuk memenuhi 50% kebutuhan beras Provinsi Riau. Untuk mencapai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan ini, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau harus mencapai sasaran tersebut. Tujuan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada periode ke 2019–2024 adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan provinsi menuju kemandirian pangan dan meningkatkan daya saing subsektor tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan pendapatan petani.

Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) adalah upaya pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan produksi padi di Riau minimal 50% pada tahun 2024. Dengan target untuk meningkatkan produktivitas rata-rata 3,7 ton/hektar ke 4,4 ton/hektar. Kegiatan Riau “Bertani” ini yaitu bergerak menanam padi, untuk peningkatan produktivitas tersebut tentunya melalui penggunaan benih unggul penakaran benih dan pengembangan varietas unggul baru (VUB). Pemerintah provinsi saat ini terus mendorong peningkatan indeks pertanaman dari Indeks Pertanaman (IP)123 ke IP200, Saat ini, indeks IP100 masih digunakan dalam pengelolaan lahan dan air. Dalam peningkatan produksi padi juga melakukan penerapan mekanisasi melalui alat mesin pertanian dengan memberdayakan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan juga Brigade Alsintan. Upaya untuk meningkatkan produksi padi juga mencakup penguatan kelembagaan melalui klaster koporasi petani atau food estate, yaitu Badan Usaha Milik Petani (BUMP), yang berbentuk koperasi atau PT dengan melakukan pelatihan pertanian, regenerasi petani (Petani Muda).

Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) yang dikelola oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau telah berjalan sejak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai pada tahun 2019. Keberlanjutan program ini tergantung pada persetujuan Gubernur Riau, mengingat capaian Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) hingga saat ini belum mencapai keberhasilan yang sepenuhnya memuaskan.

Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan utama menjamin ketersediaan beras di wilayah Riau. Melalui kegiatan menanam padi, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi di Provinsi Riau dan menciptakan keselarasan antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah daerah terkait dengan rencana tanam padi di Riau dari tahun 2019 hingga 2024. Strategi "Riau Bertani" berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk optimalisasi lahan dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Program ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks pertanaman melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan penerapan mekanisasi pertanian. Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Riau, salah satu fokusnya adalah meningkatkan jumlah alsintan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan nilai tukar usaha pertanian.

Pemerintah Provinsi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau, serta pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Kerjasama ini dilakukan melalui rapat koordinasi tahunan dan kegiatan sosialisasi pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan target produktivitas padi di Provinsi Riau melalui program Riau bergerak tanam padi (Bertani). Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah daerah

Kabupaten/Kota memiliki perjanjian (MoU) untuk melaksanakan program di Provinsi Riau.

Adapun dinas-dinas yang melakukan MoU pada kesempatan tersebut yakni, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuansing, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan, Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Kabupaten Kampar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, dan yang terakhir Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai (mediacenter.riau.go.id, 07 desember 2023).

Tabel 1.1
Perhitungan Jumlah Target Produksi Padi Tahun 2021-2024

Tahun	Kebutuhan beras (Ton)	Target produksi padi (ton)		
		30%	40%	50%
2021	826.348	247.904	330.539	413.174
2022	837.917	251.375	335.167	418.959
2023	849.648	254.894	339.859	424.824
2024	861.543	258.463	344.617	430.772

Sumber : Dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura 2023

Berdasarkan sensus wilayah geografis yang sangat luas penduduk provinsi Riau dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), mengalami peningkatan, pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2021 jumlah penduduk provinsi Riau 6.493.603 di perkiraan tahun 2023 jumlah penduduk meningkat menjadi 6.735.329 orang. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maka konsumsi beras perkapita meningkat sebesar 81,7 kg/kapita/tahun.

Tabel 1.2
Produksi Padi Di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (ton)
2022-2023

Kabupaten/kota	Produksi Padi	
	2022	2023*
Kuantan Singingi	21.361	25.698
Indragiri Hulu	3.672	3.467
Indragiri Hilir	57.471	52.889
Pelalawan	18.942	18.222
Siak	29.464	26.493
Kampar	11.663	10.633
Rokan Hulu	5.849	5.982
Bengkalis	15.168	16.960
Rokan Hilir	34.456	34.252
Kep. Meranti	6.135	6.632
Pekanbaru	0	0
Dumai	9.376	4.745
Riau	213.557	205.973

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS Provinsi Riau)

Produksi padi di Provinsi Riau mengalami penurunan dari 213.557 ton pada tahun 2022 menjadi 205.973 ton pada tahun 2023, mencerminkan tantangan dalam mempertahankan produktivitas sektor pertanian. Beberapa kabupaten/kota seperti Kuantan Singingi, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti mencatat peningkatan produksi, sementara daerah lain, termasuk Indragiri Hilir, Siak, Kampar, dan Dumai, mengalami penurunan signifikan. Rokan Hulu menunjukkan peningkatan kecil, sedangkan Rokan Hilir hanya mengalami penurunan marginal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penurunan keseluruhan ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Provinsi Riau.

Tabel 1.3
Produksi Beras Di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (ton beras), 2022-2023

Kabupaten/kota	Produksi Beras	
	2022	2023
Kuantan Singingi	12.259	14.748
Indragiri Hulu	2.107	1.990
Indragiri Hilir	32.983	30.353
Pelalawan	10.871	10.457
Siak	16.909	15.205
Kampar	6.694	6.102
Rokan Hulu	3.357	3.433
Bengkalis	8.705	9.733
Rokan Hilir	19.774	19.657
Kep. Meranti	3.521	3.806
Pekanbaru	0	0
Dumai	5.381	2.723
Riau	122.561	118.209

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS Provinsi Riau)

Produksi beras di Provinsi Riau menurun dari 122.561 ton pada tahun 2022 menjadi 118.209 ton pada tahun 2023, menunjukkan tantangan dalam menjaga produktivitas di tingkat provinsi. Beberapa kabupaten/kota, seperti Kuantan Singingi, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, mencatat peningkatan produksi, sementara Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Kampar, dan Dumai mengalami penurunan signifikan. Rokan Hulu mencatat sedikit peningkatan, sedangkan Rokan Hilir mengalami penurunan marginal. Kota Pekanbaru tetap tidak memproduksi beras selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Provinsi Riau.

Gubernur Riau mengatakan bahwa salah satu bagian dari upaya strategi Riau Bertani adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, seperti penyediaan alsintan dan optimalisasi lahan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemda untuk meningkatkan indeks pertanaman melalui optimalisasi lahan dan penerapan mekanisasi melalui peningkatan jumlah alsintan sebanyak 284 unit yang diberikan kepada kelompok tani di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau (Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau 2021).

Sektor pertanian telah menjadi prioritas dan sangat penting dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau. 284 unit yang diserahkan itu termasuk packing dan grading, power thresher multiguna, sarana pembangunan UPH untuk kedelai, jagung, dan bahan lain, dan dryer ultra violet. Selanjutnya adalah traktor tangan, kendaraan roda tiga, pekarangan pangan lestari, alat pasca panen hortikultura, combine harvester sedang dan kecil, penggiling jagung mobile, penggiling jagung, polisher, dan alat sarana UPH TP untuk kedelai, jagung, dan lainnya.

Dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau untuk membuat rancangan untuk semua potensi pangan yang ada. Pemimpin meminta Distanhor se-Riau untuk mengoptimalkan 62.689 hektar lahan padi yang ada dan menaikkan IP minimal sampai 200 serta meningkatkan produktivitas (mediacenter.riau.go.id, 30 Juni 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keputusan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT. 050/M/11/2024 Tentang satuan tugas swasembada pangan Di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merancang Program Optimalisasi Produksi Padi Riau (Ops Padi Riau) sebagai langkah strategis untuk mendukung program Swasembada Pangan Nasional (SPN), khususnya dalam memenuhi kebutuhan padi atau beras di Indonesia. Program Riau Bertani menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat ketahanan pangan di provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi padi dengan memperkuat kebijakan pembangunan sub sektor tanaman pangan di Riau. Rencana program Ops Padi Riau ini telah dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Gubernur Riau Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Basriman, di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi, Beliau mengatakan “Dengan program ini, kami berharap dapat mengurangi kekurangan produksi padi Provinsi Riau”.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi besar sebagai penghasil beras karena luas dan kesuburan tanahnya, namun kebijakan terkait pembatasan alih fungsi lahan minim, sehingga banyak petani beralih dari pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit (Anwar dkk:2023).

Tabel 1.4

Data Realisasi Padi Di kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023

NO	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rokan Hilir	39.556,86	37.209,11	37.723,71	34.456,00	34.252,00

Sumber: Dinas pangan tanaman pangan dan hortikultura 2023

Data realisasi padi di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2019-2023 menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, angka realisasi tercatat sebesar 39.556,86. Kemudian, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 37.209,11. Selanjutnya, pada tahun 2021, realisasi mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 37.723,71. Namun, pada tahun 2022 angka tersebut kembali menurun menjadi 34.456,00 dan terus berlanjut menurun pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 34.252,00.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian terdahulu mengenai analisis Program Riau Bertani menunjukkan di Kabupaten Kampar sudah terjalankan namun masih ada beberapa kendala seperti pendanaan/anggaran yang kurang jika masih mengharapkan dana APBD, kurangnya pengetahuan petani dalam pengelolaan benih serta kendala yang dihadapi dilapangan, ada beberapa petani yang mengaku belum mendapatkan benih unggul yang ada dipenangkaran benih, begitupun dengan pupuk jadi, petani masih banyak yang menanam benih lokal saja. Selain itu juga masalah hama seperti tikus, burung pipit, wareng coklat, kutu padi dan juga irigasi air yang rusak menyebabkan petani masih mengalami puso.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat di simpulkan juga hasil dari penelitian terdahulu mengenai efektivitas implementasi kebijakan pupuk subsidi pada tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hilir Pemerintah dan produsen pupuk telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk, termasuk meminta produsen lain untuk memasok pupuk ke daerah yang membutuhkan guna mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga di pasar. Subsidi yang diberikan harus mencerminkan biaya pengiriman pupuk ke petani, dan audit atas struktur biaya produksi dan operasional produsen pupuk harus dilakukan untuk menghilangkan biaya yang tidak relevan. Distribusi pupuk dari hulu ke hilir tidak terkontrol. Menteri Pertanian harus memberi tanggung jawab kepada kepala daerah untuk mendistribusikan pupuk melalui jalur birokrasi ke aparatnya, mulai dari kecamatan, lurah, hingga kepala desa. Selain distribusi, kepala daerah juga harus menginventarisasi berdasarkan luas lahan pertanian untuk menjadikan ini basis pangan daerah (Yuliani 2015).

Implementasi Program Riau Bertani di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa tantangan tantangan seperti koordinasi, alokasi sumber daya, akses alat pertanian, dan faktor cuaca masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Maka dari itu dengan adanya tantangan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau terkait Program Riau Bertani Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan diatas oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Implementasi Program “Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)” Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Riau (Bertani) oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu “Untuk mengetahui implementasi Program Riau (Bertani) Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis , adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi manfaat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan implementasi. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya dan memperluas cakrawala tentang ilmu-ilmu yang ada didalam penelitian ini sehingga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini bisa menjadi ladang pahala bagi penulis dengan memanfaatkan dan mengambil ilmu pengetahuan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu kontribusi pemikiran dan sebagai rangkaian usaha dalam penerapan program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah ber Implementasi Program “Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)” Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan untuk mempermudah pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini, yang mana terdiri dari enam dan sub bab antara lain sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang teori yang melandasi penulisan ini, yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian dari berbagai jenis penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat objek yang akan diteliti, struktur dan aktivitas perusahaan.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis merangkum pembahasan bab-bab sebelumnya kemudian memberikan beberapa saran yang bermanfaat.

BAB VI : Penutup

Bab ini membahas kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan sarana bagi pihak terkait serta saran bagi pihak untuk penelitian yang akan datang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Keputusan itu bisa berarti apa yang harus dilakukan atau tidak. "Publik" dapat berarti perusahaan dan masyarakat atau negara-sistem politik dan administrasi. Meskipun "pemerintah" adalah individu atau sekelompok individu yang diberi wewenang oleh seluruh anggota sistem politik (Abdul Wahab 2012:3).

Kebijakan publik dapat berupa nasional, regional, atau lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi, ada banyak definisi kebijakan publik (public policy), tergantung pada cara kita memahaminya (DR. Taufiqurokhman, 2008:3).

Kebijakan publik (public policy) adalah konsep unik yang didefinisikan dan diartikan secara akademik. Para ahli memberikan berbagai definisi kebijakan publik. Eyestone dalam Andi & Gruntur (2019:7) memberi definisi kebijakan publik sebagai "hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya." Anderson Dalam Andi & Gruntur (2019:7) menyatakan bahwa "kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Istilah kebijakan sering diganti dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rencana bisnis. Syafie (2006:104) dalam Tahir (2011:38) kebijakan "policy" harus dibedakan dari kebijaksanaan (wisdom), karena kebijaksanaan adalah pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan oleh orang yang berwenang sesuai dengan situasi dan kondisi tempat. Dengan demikian, Syafiie menganggap kebijakan publik sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu masalah karena akan mencakup upaya untuk memecahkan, menfurangi, dan mencegah hal-hal yang tidak baik serta menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Pramono (2020:30&31) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud."

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dalam Mustari (2015:136) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang jauh lebih penting



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pada pembuatan kebijakan). Jika tidak dilaksanakan, kebijakan akan hanya menjadi rencana atau impian indah yang tersimpan di lemari es. Dengan kata lain, penetapan atau persetujuan kebijakan tidak merupakan akhir dari pembuatan kebijakan.

Istilah "implementasi kebijakan" mengacu pada berbagai tindakan yang dilakukan setelah pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan para pejabat pemerintah (Winarno 2007) dalam Ardyansyah (2010:95). Kegiatan implementasi mencakup tindakan oleh berbagai pihak, terutama birokrat, yang dimaksudkan untuk menjalankan program. Implementasi kebijakan terdiri dari empat jenis kegiatan yang berkaitan dengan badan pelaksana kebijakan. Pertama, badan pelaksana yang diberi wewenang oleh undang-undang harus mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan program secara efektif. Kedua, badan pelaksana harus menciptakan aturan dan arahan dasar tentang anggaran, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan pelaksana harus mengatur kegiatan mereka dengan membuat aturan dan unit birokrasi untuk mengatur kegiatan. Keempat, badan pelaksana memberikan pembatasan atau keuntungan kepada kelompok target atau pelanggan.

Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan menjadi pola operasional dan terus berusaha untuk mencapai perubahan yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (1983:4) dalam Fahturrahman(2016:18) "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku atau dirumuskan dan mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian", Definisi ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*) dari program.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Ada beberapa model implementasi kebijakan publik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Model-model nya sebagai berikut:

2.3.1 Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul

Sabatier Model Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan model kerangka analisis implementasi. Ada tiga variabel membentuk proses implementasi. Pertama, variabel independen adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan masalah, yang ditunjukkan oleh masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang diinginkan. Kedua, variabel intervening adalah kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, yang ditunjukkan oleh kejelasan dan konsistensi tujuan, penerapan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, dan aturan pelaksanaan. Ketiga, variabel dependen adalah fase implementasi yang terdiri dari lima tahapan. yakni pemahaman dari lembaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar (Ardyansyah 2010:105–6).

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III

Implementasi kebijakan adalah proses yang selalu berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan yang akan memperoleh hasil (output), dan dampak (outcome) yang sesuai dengan tujuan. Untuk menerapkan melalui program atau melalui formulasi kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas dimulai dari program, proyek, dan kegiatan, Edwards mengajukan dua pertanyaan utama: (1) apa saja yang diperlukan untuk implementasi yang berhasil? (2) Apa saja hambatan utama keberhasilan implementasi? Berdasarkan pertanyaan tersebut, empat komponen, atau variabel, diidentifikasi sebagai syarat penting untuk berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut yakni:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) serta konsentrasi informasi yang disampaikan.



b. Resources (Sumber Daya)

Mencakup empat komponen yakni staf yang cukup (kuantitas & kualitas): informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.

d. Struktur Birokrasi

Ada tata aliran pekerjaan, pelaksanaan program, dan standar prosedur operasional (SOP). Jika tidak ada, sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan karena penyelesaian masalah ad-hoc memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus yang tidak dilakukan dengan cara yang biasa. Fragmentasi organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi. (Subianto 2020:70).

2.3.3 Model Transaksional Oleh Donald P. Warwick

Menurut Donald P. Warwick dalam tulisannya yang berjudul *"Integrating Planning and Implementation: A Transactional Approach"* (1979), Prinsipnya berasal dari pemahaman bahwa hubungan antara perencanaan dan implementasi tidak dapat diabaikan untuk memahami berbagai masalah yang muncul pada tahap pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan. Perencanaan bukan proses yang terpisah dari pelaksanaan. Beragam kekuatan akan berpengaruh pada tahap implementasi sebagai faktor yang mendorong, memperlancar, atau menghambat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan program. (a) Pada tahap perencanaan, penyusunan rencana dan program pengembangan yang tepat merupakan syarat, dimana kemampuan dan keterbatasan dibandingkan dengan tuntutan terhadap perubahan dan pelayanan terus meningkat. Kemampuan perencana meliputi empat aspek utama yakni (1) Kemampuan staf perencanaan, (2) Kemampuan dari organisasi perencana, (3) Kemampuan dalam teknik analisis, serta (4) Mutu informasi yang diperlukan. Kemudian Tahap Implementasi. Dalam implementasi kebijakan atau program terdapat dua kategori faktor yang bekerja serta mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi proyek yaitu: (1). Faktor pendorong (*facilitating conditions*), serta (2). Faktor penghambat (*impending conditions*) tidak ada suatu rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya terlepas dari pengaruh kekuatan politik, historis/sejarah ataupun nilai sosial budaya (Subianto 2020:50–51).

2.3.4 Model Goggin

Untuk mengimplementasikan kebijakan menggunakan model Goggin ini, dapat diidentifikasi beberapa variabel yang mempengaruhi tujuan implementasi formal, yaitu (1) bentuk dan isi kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan dapat mengatur implementasi, (2) kemampuan organisasi untuk memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi, seperti dana dan insentif lainnya, dan (3) dampak masyarakat dan lingkungan yang dapat terjadi (Goggin et.al., 1990 dalam Marsuyetno and Harahap 2013:279)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Model Deskriptif

William N. Dunn (1994) mengatakan bahwa model kebijakan dapat dibandingkan dan dipertimbangkan berdasarkan berbagai asumsi, yang paling penting di antaranya adalah: (1) perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk penyajian, dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk utama model kebijakan adalah model deskriptif dan model normative. Tujuan model deskriptif adalah untuk menjelaskan dan atau meramalkan alasan mengapa seseorang memilih kebijakan tertentu, dan model normative digubal untuk memenuhi tujuan tersebut (Marsuyetno and Harahap 2013:280).

2.3.6 Model Charles O. Jones

Jones 1996:166 dalam Auldrin M. Ponto,dkk (2019) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk melaksanakan sebuah program dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan,yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan program. Kemudian, aktivitas kedua adalah interpretasi pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan instruksi yang tepat dan dapat diterima.

Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah applikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan publik yang telah ditentukan. Menurut Jones tiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas yang dimaksud adalah

- a. Organisasi, Keberhasilan implementasi kebijakan harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Jones (1994:166) mendefinisikan organisasi sebagai "kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan". Bagi Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali Sumber Daya, (b) unit-unit/struktur organisasi, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan.

1. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan dapat dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya penting untuk implementasi kebijakan termasuk staf yang cukup besar dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka, otoritas, dan kemampuan untuk mengubah usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Untuk membuat pelaksanaan kebijakan lebih mudah, sumber daya ini harus disediakan. Gagalnya implementasi kebijakan disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan dana atau fasilitas untuk implementasi kebijakan.

2. Unit-unit/struktur organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi yang merupakan bagian dari model besar, yaitu struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal yang digunakan untuk mengelola organisasi. Menurut Handoko (1998:169) dalam (Auldrin M. Ponto, dkk 2019) "Dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi." Struktur mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukan organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan. Untuk menjaga agar birokrasi tidak melewati wewenang fungsi, bagian, atau posisi, struktur atau unit harus diatur dengan jelas. Peraturan yang jelas akan memungkinkan prosedur kerja yang baku dan menghilangkan tugas tumpang tindih.

3. Metode

Menurut Agus M. Hardjana (2003) dalam Auldrin M. Ponto, dkk (2019) metode adalah kumpulan tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan keberhasilan proses manajemen, terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah. Peran metode dalam pencapaian tujuan organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sangat penting. Dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkannya.

- b. Interpretasi, Menurut Jones (1994:320) ia mengatakan bahwa, "Mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas. Jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan pada akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam melaksanakan kebijakan
- c. Aplikasi (penerapan), Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan proses yang berubah-ubah, dengan pelaksana dan petugas diarahkan oleh pedoman program dan patokan, atau secara khusus diarahkan oleh kondisi aktual. Sebuah kebijakan hanya akan sukses dan berhasil jika dapat diaplikasikan dan diterapkan. Jika tidak, kebijakan hanya akan menjadi tumpukan kertas. Menurut Jones (1994:320) "Ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program" Diharapkan kelompok sasaran akan memberikan respons melalui aplikasi ini. Dengan aplikasi atau penerapan kebijakan akan memungkinkan untuk menentukan apakah lingkungan mendukung atau menentang pelaksanaan dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, dan bahkan dapat menimbulkan tantangan bagi implementor. Aplikasi terdiri dari penyediaan layanan secara teratur, pembayaran, atau cara lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul dilapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itulah, apakah kebijakan itu dalam tataran implementasi telah terorganisir dengan baik, juga telah dijabarkan produk kebijakan itu ke hal-hal yang lebih operasional, ataukah juga telah siap dan mudah di aplikasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki bersama.

Dalam penelitian ini mengambil model Charles O. Jones dengan 3 variabel yang diambil yakni, organisasi, interpretasi dan aplikasi (penerapan) yang di duga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan 3 variabel tersebut mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

2.4 Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)

Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) adalah upaya pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan produksi padi di Riau minimal 50% pada tahun 2024. Dengan target untuk meningkatkan produktivitas rata-rata 3,7 ton/hektar ke 4,4 ton/hektar. Kegiatan Riau “Bertani” ini yaitu bergerak menanam padi, untuk peningkatan produktivitas tersebut tentunya melalui penggunaan benih unggul penakaran benih dan pengembangan varietas unggul baru (VUB). Pemerintah provinsi saat ini terus mendorong peningkatan indeks pertanaman dari Indeks Pertanaman (IP)123 ke IP200, Saat ini, indeks IP100 masih digunakan dalam pengelolaan lahan dan air. Dalam peningkatan produksi padi juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penerapan mekanisasi melalui alat mesin pertanian dengan memberdayakan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan juga Brigade Alsintan. Upaya untuk meningkatkan produksi padi juga mencakup penguatan kelembagaan melalui klaster koporasi petani atau food estate, yaitu Badan Usaha Milik Petani (BUMP), yang berbentuk koperasi atau PT dengan melakukan pelatihan pertanian, regenerasi petani atau Petani Muda (InfoPublik 2021).

Pemerintah Provinsi Riau menerapkan program Riau Bertani untuk memenuhi kebutuhan beras individu. Untuk meningkatkan produksi padi di Riau, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau memainkan peran penting dalam kegiatan Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani). Kegiatan ini adalah salah satu upaya pemereintah Provinsi Riau untuk menyamakan persepsi antara pemerintah Provinsi Riau dan daerah terkait dengan roadmap tanam padi di Riau tahun 2020–2024.

2.5 Dasar Hukum Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)

Dasar hukum Riau Bertani berdasar kepada:

- a. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024.
- b. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau No 41 Tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan susunan struktur organisasi bidang prasarana, sarana dan pertanian, dan kepala seksi pembiayaan agribisnis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau No 42 Tahun 2020 mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pembiayaan, ketentuan penutup.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Visi dan misi.

Visinya yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau/Bersatu)". Sedangkan Misi dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang mengacu pada Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung Misi ke-3 dan Misi ke-5 Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dinyatakan dalam misi berikut: Misi ke-3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Tujuannya adalah mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Sedangkan sasarannya yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan, meningkatnya ketahanan pangan daerah. Misi ke-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja ASN dan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan publik sedangkan Sasarannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

2.6 Pandangan Islam Tentang Pertanian

Pertanian adalah proses produksi biologis yang dilakukan di atas tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah yang bersangkutan untuk kegiatan produksi. Kegiatan pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari.

Di dalam al-Qur'an, telah disebutkan anugerah-anugerah yang Ia berikan agar mau bercocok tanam. Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan dalam kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam bahwa Allah telah menyiapkan bumi untuk pertumbuhan dan pendapatan. Oleh karena itu, Allah membuat bumi itu dzalul, yang berarti mudah dijelajahi, dan bisath, yang berarti hamparan, di mana nikmatnya dapat diingat dan disyukuri. Allah SWT Berfirman :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10)

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya)” (QS. Ar-Rahman:10)

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)

“Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-Rahman [55]: 11-13)”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain bumi, Allah juga memudahkan adanya baik dari langit maupun bumi. Dari langit Allah turunkan hujan, sedang dari bumi Allah alirkan sungai-sungai yang kemudian bisa menghidupkan bumi.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا

“Dan Dialah yang menurunkan air dan langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. (QS. Al-An’am [6]: 99)”

Menurut al-Qur'an dan Hadits Nabi saw, bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan yang mulia. Para ulama mengatakan mengelola pertanian merupakan fardhu kifaya, yaitu Untuk menjaga ketersediaan makanan yang konsisten, kelompok masyarakat harus memiliki orang yang benar-benar bertanggung jawab atas pertanian, baik itu diberikan oleh pemerintah secara langsung atau dipegang oleh kelompok masyarakat. Dapat dilihat beberapa ayat yang berkaitan dengan pertanian.

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
مُتَأَفِّلًا يُؤْمِنُونَ (30)

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? “(QS.Al Anbiya:30)

Ayat di atas menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya padu, kemudian dipisahkan, dan segala sesuatu yang hidup dari air diciptakan. Ketika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT mengatakan bahwa bumi dipisahkan secara terbuka, itu berarti bahwa bumi terpisah dari planet-planet lain di bima sakti, seperti merkurius, venus, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus, dan pluto, serta planet-planet lainnya di bima sakti. Galaksi-gala Setelah terpisah dari planet lainnya, bumi dan kekhasannya menghasilkan makhluk dan tumbuhan lainnya dengan menggunakan air dan memiliki kebutuhan yang besar terhadap air. Keberadaan air hujan sebagai sumber kehidupan telah memastikan kesinambungan hidup bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tumbuh-tumbuhan memberikan nutrisi kepada manusia. Pertanian dapat memenuhi kebutuhan nutrisi manusia seperti beras, gandum, jagung, dan buah-buahan. Dengan melestarikan pertanian, kebutuhan manusia terhadap makanan pokok serta buah-buahan, sayur-sayuran, dan kebutuhan nabati lainnya dapat dipenuhi secara konsisten.

Ayat-ayat di atas merupakan peringatan dari Allah untuk manusia atas nikmat bercocok tanam dan Allah telah memudahkan alat-alat atau keperluannya.

Rasulullah saw pun bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
رواه البخاري

“Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani kemudian burung, manusia atau pun binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekah baginya. (HR. Bukhari).

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menunjukkan potensi-potensi yang dimilikinya. Artinya, orang-orang atau masyarakat yang ada di Riau dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian, seperti menanam padi, dan dengan

berbagai anugerahnya, termasuk potensi alam. Ini menunjukkan rasa syukur manusia terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, seperti yang diungkapkan dalam salah satu ayat di atas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nela Roza. Sujianto. Harapan Tua R.F.S. (2019) Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 02	Implementasi Program Beras Sejahtera	Hasil dari program implementasi beras sejahtera adalah kurang tepat sasaran, dalam antrian bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah masih kurang tepat dan kurang sesuai dengan orang yang benar-benar berhak menerimanya.	Pada penelitian Nela Roza. Sujianto. Harapan Tua R.F.S. membahas tentang Program Beras Sejahtera Sedangkan peneliti membahas tentang program Riau Bergerak Tanam Padi.
2.	Niky Sengkey. Recky H. Sendouw. Jeane Mantiri (2018) Jurnal Civic Education, Volume 02, Nomor 01	Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe yaitu Pemerintah yang ada melaksanakan program ini tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga terjadi penyaluran beras yang tidak tepat sasaran, waktu pendistribusian yang tidak menentu, harga tebus yang diberikan	Pada penelitian Niky Sengkey. Recky H. Sendouw. Jeane Mantiri membahas tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

			tidak sesuai dengan jumlah beras yang diterima dan seringkali kualitas beras berkutu, berbau, pecah-pecah dan berwarna kuning.	Minahasa Selatan sedangkan peneliti membahas tentang implementasi program Riau bergerak tanam padi (Bertani) di Provinsi Riau.
3.	Pebi Julianto (2020) Jurnal The Leader's Writing Volume 01, No 01	Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BTNP) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci	Berdasarkan hasil penelitian yaitu Bantuan yang diberikan pemerintah telah dilaksanakan secara terstruktur, tepat sasaran, tepat waktu dan mengurangi beban masyarakat miskin dalam hal pengeluaran serta dapat membantu ketahanan pangan masyarakat miskin.	Pada penelitian Pebi Julianto membahas tentang Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BTNP) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Di Provinsi Riau.
4.	Orina Kogoya. Martha Ogotan. Very Y londa (2018)	Implementasi Program Beras Sejahtera Desa Guburuni Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya	Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi dalam rangka implementasi program Rastra/Raskin di Desa Guburini dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Program Rastra/Raskin disosialisasikan	Pada penelitian Orina Kogoya. Martha Ogotan. Very Y londa membahas tentang Implementasi Program Beras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), oleh pemerintah desa, oleh BPD, dan oleh kelompok kerja pelaksana distribusi rastra Desa Guburini.	Sejahtera Di Desa Guburuni Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Di Provinsi Riau.
5.	Ayu Soraya (2022) Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS) Volume 01, Nomor 02	Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Pada Era Pandemi Covid-19	Hasil penelitian tersebut yaitu Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dalam implementasi strategi yang telah dirumuskan dengan adanya berbagai program-program yang dapat membantu menjaga ketahanan pangan daerah, program tersebut adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan yang dijalankan dibidang ketahanan pangan serta Program Riau Bertani yang dijalankan di bidang tanaman pangan. Namun dalam pelaksanaan program	Pada penelitian Ayu Soraya membahas tentang Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Pada Era Pandemi Covid-19 sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ini masih banyak kendala yang dihadapi seperti anggaran yang tidak mencukupi dan budaya atau mindset masyarakat setempat.	
Desi Desnita 2022	Analisis Program Riau Bertani Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau (Studi Kasus Di Kabupaten Kampar)	Berdasarkan hasil penelitian tersebut ialah Di Kabupaten Kampar program Riau Bertani sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas pangan dan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Riau. Setelah dilaksanakannya program ini produksi padi di Kabupaten Kampar pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi ditahun 2021 mengalami penurunan produksi lagi, ini berarti pelaksanaan program Riau Bertani masih belum maksimal karena masih adanya naik turun produksi padi di Kabupaten Kampar. Program Riau Bertani masih banyak kendala yang dihadapi seperti pendanaan/anggaran yang kurang jika masih mengarapkan dana APBD, kurangnya pengetahuan petani dalam pengelolaan benih serta kendala	Pada penelitian Desi Desnita membahas tentang Analisa terkait Program Riau Bertani oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, yang memilih studi kasus di Kabupaten Kampar sedangkan penlulis membahas tentang Bagaimana Implementasi Program Riau Bertani pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau dan memiliki perbedaan dalam indikator yg digunakan dengan penulis.	

		yang dihadapi dilapangan, ada beberapa petani yang mengaku belum mendapatkan benih unggul yang ada dipenangkaran benih, begitupun dengan pupuk jadi petani masih banyak yang menanam benih lokal saja. Selain itu juga masalah hama seperti tikus, burung pipit, wareng coklat, kutu padi dan juga irigasi air yang rusak menyebabkan petani masih mengalami puso.	
--	--	--	--

Sumber : olahan penulis

2.8 Definisi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk melaksanakan sebuah program dengan tujuan mencapai hasil tertentu.

1.1 Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.

1.1.1 Sumber Daya

Sumber daya penting untuk implementasi kebijakan termasuk staf yang cukup besar dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka, otoritas, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk mengubah usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Untuk membuat pelaksanaan kebijakan lebih mudah, sumber daya ini harus disediakan.

1.1.2 Unit-Unit/Organisasi

Struktur mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukan organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan.

1.1.3 Metode

Metode adalah kumpulan tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan keberhasilan proses manajemen, terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah.

1.2 Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

1.2.1 Pemahaman Stakeholder

Keberhasilan program yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan. Keberhasilan program yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2 Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak dalam program "Riau Bergerak Tanam Padi" (Bertani) mencakup penilaian terhadap perubahan nyata yang dihasilkan oleh program tersebut terhadap aspek-aspek seperti peningkatan produksi padi, kesejahteraan petani, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak lingkungan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program telah mencapai tujuan-tujuannya serta untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program di masa depan.

1.3 Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi atau penerapan suatu kebijakan adalah proses dinamis yang dapat berubah, dengan pelaksana dan petugas dipandu oleh pedoman program, patokan, atau kondisi aktual. Keberhasilan kebijakan hanya dapat dicapai jika dapat diaplikasikan dan diterapkan dengan baik oleh pelaksana dan petugas.

1.3.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian dan pengujian terhadap sebuah kebijakan, mencakup aspek isi, implementasi, dan dampak. Ini adalah proses fungsional yang melibatkan evaluasi sepanjang tahap kebijakan, termasuk perumusan masalah, program-program proposal penyelesaian masalah, implementasi, dan dampak kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Respon dan Penerimaan Kelompok Sasaran

Dengan memahami respon dan penerimaan kelompok sasaran, implementor kebijakan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat atau target group, serta mengidentifikasi area-area di mana perubahan atau penyesuaian mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan tersebut.

2.9 Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)

Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) merupakan suatu program pemerintah Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau untuk meningkatkan produksi padi di Riau, terutama beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Riau.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian dari setiap kegiatan operasional yang di perlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat di ukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Kemudian bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang di gunakan serta melakukan pemahamannya.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Sumber	Indikator	Sub Indikator
Implementai model Charles O. Jones dalam Auldrin M. Ponto, dkk (2016)	1. Organisasi	a. Sumber Daya b. Unit-unit/struktur Organisasi c. Metode
	2. Interpretasi	a. Pemahaman stakeholder b. Evaluasi dampak
	3. Aplikasi (penerapan)	a. Evaluasi Kebijakan b. Respon dan Penerimaan Kelompok Sasaran

Sumber: Olahan Peneliti 2024

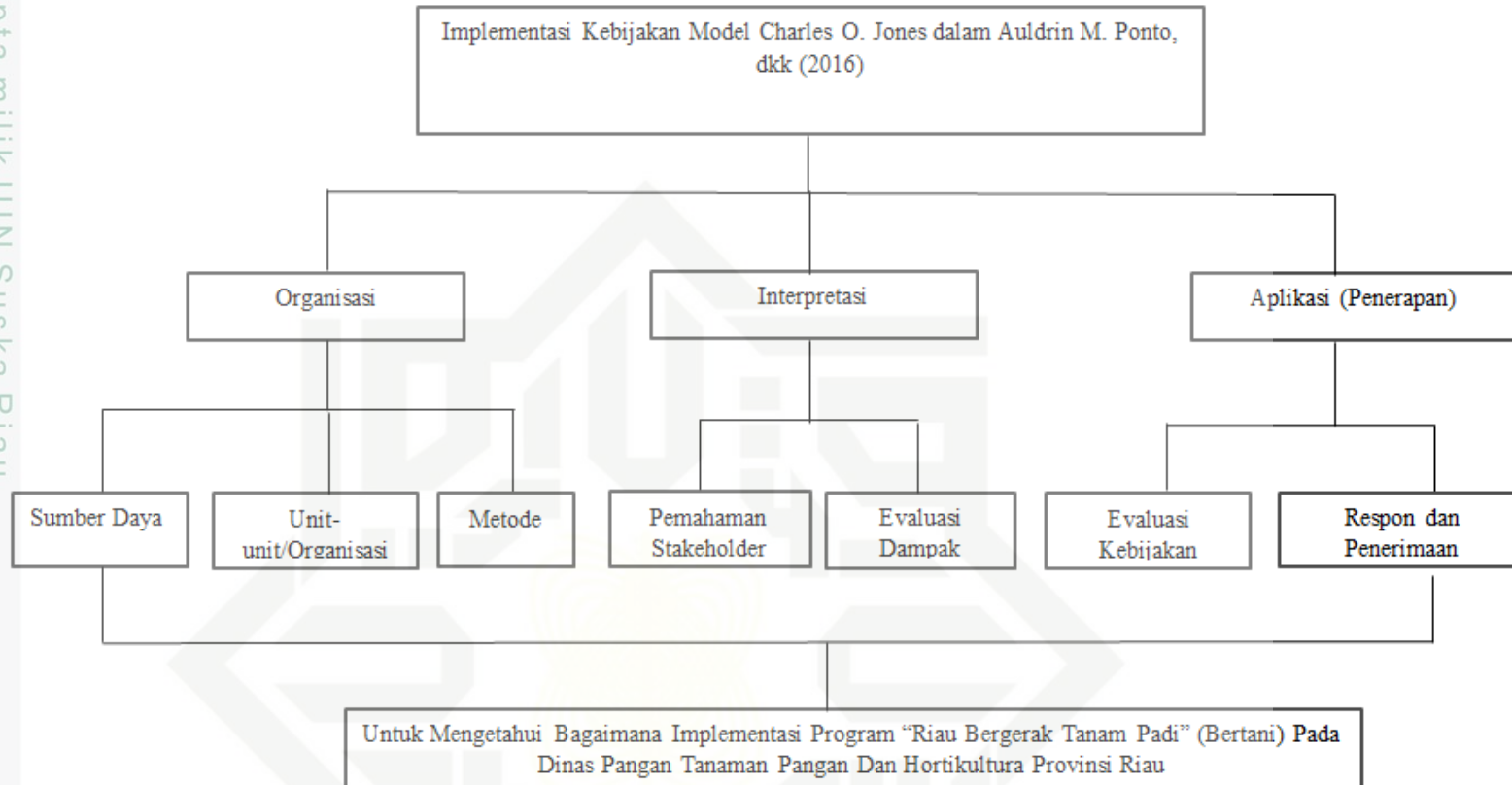
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

2.11 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian



Sumber : Olahan Penulis (Adaptasi Implementai model Charles O. Jones dalam Auldrin M. Ponto, dkk)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk meneliti sekelompok orang atau objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa saat ini. Lalu dideskripsikan bahkan ada yang menginterpretasikan secara rasional suatu kondisi atau hubungan yang ada. Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi ilmu pengetahuan sosial yang sebagian besar bergantung pada observasi manusia di lingkungannya dan di sekitarnya. Mereka mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam berbagai situasi di dunia, keberagaman manusia, tindakan, kepercayaan, dan minat yang berbeda (Katutu 2017).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan penelitian ini mengungkapkan permasalahan yang sifatnya sosial/untuk masyarakat. Metode tersebut dapat memberikan penjelasan melalui penelitian deskriptif kualitatif mengenai Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah yang dimana penelitian akan dilakukan Untuk lokasi penelitian yang telah dipilih oleh penulis ialah di Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau dan

Kabupaten Rokan Hilir. Adapun waktu muali penelitian ini adalah maret 2024 s/d selesai.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu/kelompok yang mampu menjelaskan suatu fenomena tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Bentuk dari informan penelitian q sangat beragam diantaranya adalah orang, benda maupun lembaga (organisasi).

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1
2.	Kepala Bidang Perencanaan Program	1
3.	Staff BidangTanaman Pangan	1
4.	Petani	3
Jumlah		6

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024

3.4 Jenis Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara di lokasi yang akan diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Perolehan sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi utama melalui observasi atau pengamatan dan wawancara merupakan hasil dari melihat, mendengar dan mengajukan pertanyaan yang dilakukan secara sadar, terarah dan selalu ditujukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam hal ini untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan atau catatan dan dokumen, arsip-arsip yang berkenaan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, dokumen, observasi dan sumber lainnya yaitu internet, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan topik penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang didahului pengamatan dan pencatatan atau pengamatan secara langsung secara sistematis dalam meningkatkan gejala atau fenomena yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini, observasi yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maka peneliti melakukan wawancara langsung di lapangan, yaitu pengumpulan data atau informasi dengan melakukan tanya jawab atau berkomunikasi langsung secara mendalam dengan informan itu sendiri. Dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, yaitu Implementasi Program “Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang (Rizka Mutiarani, Amrazi 2020). Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis perlukan dalam memperoleh data yang mendukung penelitian ini adalah arsip catatan, gambar, dan peristiwa sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain Muhadjir, (2000). Menurut Ulber Silalahi dalam Nurdewi (2022) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti bahwa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah proses siklus dan interaksi yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, yang menghasilkan pemahaman umum tentang apa yang sebenarnya terjadi.

a) Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data tidak pernah berhenti, terutama selama proyek kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Tahapan reduksi termasuk membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang memungkinkan menarik dan memvalidasi kesimpulan. Setelah penelitian lapangan, proses pengurangan data atau transformasi ini berlanjut sampai laporan akhir dibuat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam berbagai cara, seperti menggunakan seleksi ketat,

b) Penyajian Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miles dan Huberman menggambarkan penyajian sebagai sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan.

c) Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Selama kegiatan penelitian, temuan juga divalidasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau merupakan dinas yang baru terbentuk pada tahun 2017, hasil peleburan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau. pada kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2014-2016), Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh dinas yang berbeda, yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau.

Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 4 November 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.



4.2 Visi dan Misi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Visi dan misi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU/BERSATU)”.

2. Misi

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang mengacu pada Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung Misi ke-3 dan Misi ke-5 Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dinyatakan dalam misi berikut:

Misi ke-3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing.

Sasaran : 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.

Misi ke-5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi.

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.



Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

4.3 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

1. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta melaksanakan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional dan lingkungan dinas.
- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas :

Secretariat mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manajerial dan teknis lingkup secretariat yang meliputi Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada bidang, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional.

- a. Penyelenggara perumusan kebijakan pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis manajerial pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Tugas:

Kepala bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Seksi

Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Prasarana dan Sarana yang meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
- b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis yang meliputi Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan

Tugas:

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Fungsi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- b. Penyelenggara tugas manajerial dan teknis pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- c. Penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas manajerial dan teknis pada Seksi Sereal, Seksi Aneka Kacang- Kacangan dan Umbi-umbian, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- d. Penyelenggara tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Hortikultura

Tugas:

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayura-sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perkebunan

Tugas :

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

Fungsi:

Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Perkebunan yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis lingkup Bidang Perkebunan yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi manajerial dan teknis yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial yang meliputi Seksi Perkebunan, Seksi Pembinaan Usaha dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
7. UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Tugas:

UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibidang pembenihan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Susunan organisasinya terdiri atas kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, Seksi Produksi Benih, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

8. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas :

UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di bidang proteksi tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Susunan organisasinya terdiri atas kepala UPT , Subbag Tata Usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha. Seksi Pengendalian, Seksi pengujian pupuk pestisida dan Organisme pengganggu.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada sub bagian tata usaha, Seksi Pengendalian, Seksi pengujian pupuk pestisida dan Organisme pengganggu.
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis proteksi atau perlindungan Tanaman, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau.
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan.
- g. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat terkait dengan proteksi atau perlindungan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- h. Penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, Seksi Pengendalian, Seksi Pengujian Pupuk Pestisida dan Organisme Pengganggu.
- i. Pelaksana fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

9. UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian

Tugas:

UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di bidang pelatihan penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan.
- c. Penyelenggaraan penyediaan banuan dibidang pelatihan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).
- d. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- e. Penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas sub bagian tata usaha, seksi produksi benih dan seksi pengawasan dan sertifikasi benih.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.4 Bagian/Unit Kerja Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang yang dimaksud yaitu:

- 1) Bidang Sarana dan Prasarana;
- 2) Bidang Tanaman Pangan;
- 3) Bidang Hortikultura;

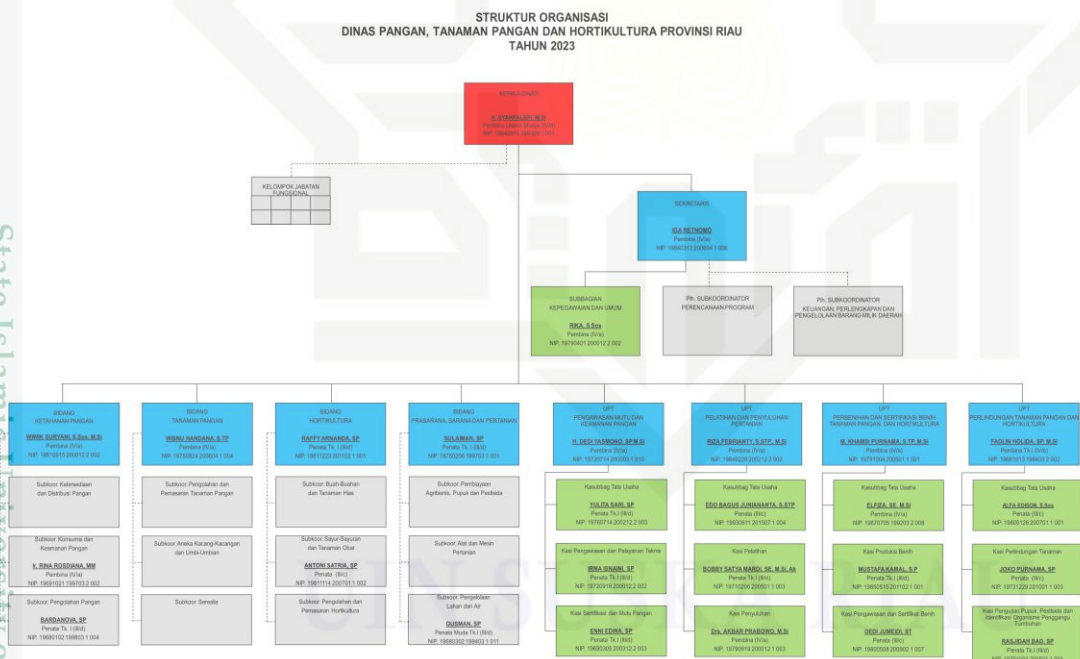
4) Bidang Perkebunan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 71 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. UPT Pembenuhan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pekebunan (Kelas A);
2. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kelas A)
3. UPT Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian (Kelas A)

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi





4.6 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

4.6.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi. Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 bersama dengan pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (Lembar Negara 1999: Nomor 181). Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Umatara antara 1014'-2030' LU dan 1000016'-101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dimana kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km². Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 kecamatan yaitu yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat (Rokan Hilir Dalam Angka Tahun 2022).

Tabel 4.1 Kecamatan Dan Luas Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Tanah Putih	1.915,23
2.	Pujud	984,90
3.	Tanah Putih Tanjung Melawan	198,90
4.	Rantau Kopar	231,13
5.	Tanjung Medan	...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Bagan Sinembah	847,35
7.	Simpang Kanan	445,55
8.	Bagan Sinembah Raya	...
9.	Balai Jaya	...
10.	Kubu	385,36
11.	Pasir Limau Kapas	669,63
12.	Kubu Babussalam	675,70
13.	Bangko	475,26
14.	Sinaboi	335,48
15.	Batu Hampar	284,31
16.	Pekaitan	465,30
17.	Rimba Melintang	235,48
18.	Bangko Pusako	732,52
Rokan Hilir		8.881,59

Sumber : Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2023

4.6.2 Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 Km² atau 888.159 Hektar, terbagi atas 18 kecamatan. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan wilayah:

- Utara : Selat Malaka
- Timur : Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Selatan : Bengkalis dan Rokan Hulu
- Barat : Provinsi Sumatera Utara

Wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian dasar merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 100 meter di atas permukaan laut. Pada daerah pesisir pantai memiliki ketinggian antara 0 s/d 6 meter dpl dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk daerah sepanjang aliran sungai, pada umumnya memiliki ketinggian antara 0 s/d 30 meter dpl. Daerah aliran sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0 s/d 15%. Daerah dengan kemiringan lereng 0 s/d 3% meliputi luasan sekitar 600.625 Ha atau 80% dari keseluruhan luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah, memiliki bentuk wilayah yang bervariasi antara datar s/d agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0 s/d 5% sampai 8–15%, dengan ketinggian antara 5 s/d 100 meter dpl.

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh masih tingginya curah hujan bahkan di saat musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.100–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten ini bervariasi antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan relatif berkisar antara 80%–84%.



4.7 Program Riau Bertani

Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) merupakan salah satu strategi pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan produksi padi di Riau. Produksi padi harus mencapai target utama dalam memenuhi kebutuhan beras minimal 50% 19 dari kebutuhan beras Riau pada tahun 2024 dengan target peningkatan produktivitas rata-rata 3,7 ton perhektar ke 4,4 ton perhektar. Riau Bertani yaitu bergerak menanam padi, untuk peningkatan produktivitas tersebut melalui penggunaan benih unggul penakaran benih dan pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB). Pemerintah Provinsi melakukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP100 ke IP200. Dalam peningkatan produksi padi juga melakukan penerapan mekanisasi melalui alat mesin pertanian dengan memberdayakan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan juga brigade alsintan.

Upaya peningkatan produksi padi adalah penguatan kelembagaan melalui klaster koporasi petani atau food estate yaitu Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk koperasi atau PT dengan melakukan pelatihan pertanian, regenerasi petani (Petani Muda) (RIAU, 2021). Riau Bertani adalah program pemerintah Provinsi Riau tujuannya memenuhi kebutuhan beras sendiri. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau dalam hal ini memiliki peran penting dalam kegiatan Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) untuk meningkatkan produksi padi di Riau. kegiatan ini sebagai salah satu upaya pemereintah Provinsi Riau untuk menyamakan persepsi antara pemerintah Provinsi Riau dan daerah terhadap roadmap tanam padi di Riau tahun 2020-2024.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan 3 indikator yang dikemukakan oleh Charles O Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi, Implementasi Program Riau Bertani Oleh Dinas Pangan Provinsi Riau Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah berjalan cukup baik namun belum maksimal. Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan dari 3 indikator tersebut sebagai berikut:

1. Organisasi

Implementasi Program Riau Bertani menunjukkan pengelolaan organisasi yang berjalan cukup baik. Pembagian tugas yang jelas dan manajemen yang efektif terhadap sumber daya manusia, finansial, dan alam memainkan peran krusial dalam mendukung keberhasilan program ini

2. Interpretasi

Interpretasi Program Riau Bertani oleh Dinas Pangan Provinsi Riau telah berjalan dengan baik, ditandai dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif melalui pendekatan partisipatif. Berbagai kegiatan, seperti rapat, sosialisasi, dan pelatihan, dapat meminimalisir hambatan pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antar-stakeholder, sehingga program dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Rokan Hilir



3. Aplikasi (penerapan)

Penerapan Program Riau Bertani di Kecamatan Rimba Melintang berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan petani, dengan antusiasme tinggi dan solidaritas kelompok yang meningkat. Namun, akses alat pertanian dan faktor cuaca tetap menjadi tantangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka mengenai Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dapat diberikan sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam Program "Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani)", perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan petani melalui forum komunikasi rutin yang melibatkan dinas, petani, dan Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Forum ini bertujuan membahas masalah seperti akses alat pertanian dan cuaca serta melibatkan DPRD dalam pengambilan keputusan untuk mempercepat respons terhadap isu-isu yang muncul.

2. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan terfokus pada teknik pertanian lokal, pemberian bibit unggul, dan teknologi efisien dengan melibatkan pakar pertanian. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala, disesuaikan dengan musim tanam, serta didukung kebijakan berkelanjutan seperti subsidi dan akses mudah ke alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutam.



DAFTAR PUSTAKA

Dalil-Dalil

AL-Qur'an. (Dalam QS. Ar-Rahman:10)

Al- Qur'an. (Dalam QS. Ar-Rahman [55]: 11-13)

Al- Qur'an. (Dalam QS. Al-An'am [6]: 99)

Hadist Riwayat Bukhari

Jurnal&Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2012. "Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara." *Jakarta: Bumi Aksara* 295.

Andi & Gruntur. 2019. "Analisis Kebijakan Publik." *Analisis Kebijakan Publik* (April):165.

Anwar, S., M. Saeri, and A. Marta. 2023. "Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4:2460–83.

Ardyansyah, Dhani. 2010. "Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* 2(3):78–91.

Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado." *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 7(1):16–26.

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M. Si. 2008. "DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si." 3.

Erma kusumaningsih, Wido prananing Tyas. 2019. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Dikota Semarang. "*Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*"

Fahurrahman, M. 2016. "Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal TARBAWI* 2(02):14–27.

Irianita 2017. Implementasi Pendaftaran Penduduk Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kota Pontianak

Katutu, Abdullah. 2017. "Berbagai Metodologi Dalam Penelitian.Pdf." 334.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Lubis, H. dkk. 2018. Pengaruh Subsidi Input Petanian Terhadap Produktivitas Sektor Pertanian Di Indonesia
 Marsuyetno, and R. Hamdani Harahap. 2013. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)." *(JAB) Jurnal Administrasi Publik* 2(1):271–92.
 Mustari, Nuryanti. 2015. "Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)." *Kebijakan Publik Deliberatif* 1:286.
 Nurdewi, Nurdewi. 2022. "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(2):297–303. doi: 10.55681/sentri.v1i2.235.
 Nurjanah, Devi. 2020. "Analisis Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau." *Jurnal Agroteknologi Agribisnis Dan Akuakultur* Vol. 1(1):91–98.
 Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
 Rizka Mutiarani, Amrazi, Izhar. 2020. "Metode Observasi Menurut Sutrisno Hadi (Dalam Sugiyono, 2017:203)." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 8(3):1–8.
 Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi Dan Evaluasi*.
 Tahir, Arifin. 2011. "Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." 978–79.
 Thamrin Muhammad. 2011. "Evaluasi program penyuluhan pertanian dan pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pendapatan petani padi sawah", *Jurnal Ilmu Pertanian* vol.16 no. 3
 Wajong Stevano dkk. 2022. *Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sario Kota Baru*
 Yuliani, Febri. 2015. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir." *Spirit Publik* 10(1):133–62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi

Desi Desnita. (2022). Analisis Program Riau Bertani Oleh Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau (Studi Kasus Di Kabupaten Kampar)

Isnaeni Dewi .(2016). Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Pakem, kabupaten Sleman

Undang-Undang:

Peraturan Daerah (Perda)Provinsi Riau No 7 Tahun 2019.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau No 41 Tahun 2020.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau No 42 Tahun 2020.

Sumber Lain:

https://pmddukcapil.riau.go.id/dw.php?filename=Profil_bangduk_2022.pdf

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/03/a78164ccd3ad09bdc88e70a2/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2022.html>

<https://distanhor.riau.go.id/berita/dberita/pengarahan-dan-penyerahan-alat-mesin-pertanian-alsintan-oleh-bapak-gubernur>

<https://mediacenter.riau.go.id/read/82734/gerakan-penyediaan-pangan-di-riau-dinas-ptph-.html>

<https://mediacenter.riau.go.id/read/63269/gubri.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara penulis bersama Bapak Gamal Selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Wawancara penulis bersama Bapak Amaluddin Selaku Kepala Bidang Perencanaan Program, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara penulis bersama Ibu Nurul Selaku Staff Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau



Wawancara penulis bersama Bapak Tasun Selaku Ketua Gapoktan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir (Baju Merah)

Wawancara penulis bersama Bapak Prayitno Selaku Petani Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir (Baju Putih)

Wawancara penulis bersama Bapak Harisman Selaku Petani Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir (Baju coklat).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-4898/Un.04/F.VII/PP.00.9/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 10 Juli 2024 M
3 Muharram 1446 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nikmatul Khoiriyah
NIM. : 12070522227
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Riau Bergerak Tanam Padi (BERTANI) oleh Dinas
Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,

Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP 19760426 200701 1 016

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-3306/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/05/2024
: Biasa
: -
: Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 20 Mei 2024 M
12 Zulqaidah 1445 H

Kepada
Yth. Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nikmatul Khoiriyah
NIM : 12070522227
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

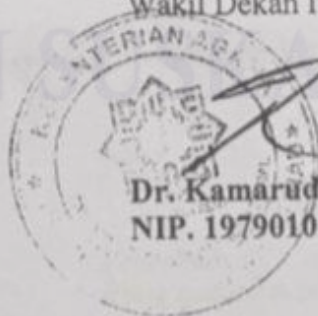
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI RIAU BERGERAK TANAM PADI (BERTANI) OLEH DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU (STUDI KABUPATEN SIAK)".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. HR. SOEBRANTAS NO. 4 - PEKANBARU KODE POS : 28294
TELP. (0761) 7434974

E-mail : distanhor@riau.go.id Website : <http://distanhor.riau.go.id>

SURAT KETERANGAN Nomor : 071/ DISPTPH/SETDIS/59

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika, S.Sos
NIM : 19790401 200012 2 002
Pangkat/ Gol : Pembina/IV.A
Jabatan : Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Nikmatul Khoiriyah/12070522227
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Maksud : Telah menyelesaikan Penelitian dan Pengambilan Data Riset di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selama 2 minggu dari tanggal 16 Juli s/d 29 Juli 2024 Selama Penelitian dan Pengambilan Data Riset yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Sehingga surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 November 2024

a.n PLt. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Kasubag Kepegawaian dan Umum



RIKA, S.Sos

NIP. 19790401 200012 2 002

Tembusan

1. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penelitian yang mengutip sumber data atau informasi harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penelitian yang mengutip hanya untuk kepentingan penelitian pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan, suatu masalah.
Penelitian yang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Penelitian yang mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau